

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2003
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah telah melakukan penghitungan Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum tersebut pada huruf a, dan dengan memperhatikan Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 6 November 2003, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004.

BAB I
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk Provinsi;
 - b. Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2004 ditetapkan 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari penerimaan Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagikan kepada Daerah berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Dana Reboisasi.
- (3) Besaran Dana Alokasi Umum untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
 - b. Untuk Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

BAB II
PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

- (1) Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104

Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.

- (2) Penghitungan Dana Alokasi Umum suatu Daerah juga mempertimbangkan Faktor Penyeimbang dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Daerah.
- (3) Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas Alokasi Minimum kepada Daerah yang diperhitungkan dalam bentuk lumpsum dan berdasarkan proporsi belanja pegawai negeri sipil yang menjadi beban Daerah.
- (4) Khusus untuk daerah Kabupaten/Kota baru hasil pemekaran yang baru pertama kali menerima Dana Alokasi Umum, perhitungan Dana Alokasi Umum dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan belanja pegawai dari Daerah induknya.

Pasal 3

- (1) Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) Besarnya Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 terinci dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh Daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi

Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri serta ditembuskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 160

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 109 TAHUN 2003
TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2004

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2004 (miliar rupiah)
1	2	3
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	76.124
1	Kab. Aceh Barat	115.732
2	Kab. Aceh Besar	192.200
3	Kab. Aceh Selatan	126.339
4	Kab. Aceh Singkil	106.034

5	Kab. Aceh Tengah	158.675
6	Kab. Aceh Tenggara	117.296
7	Kab. Aceh Timur	143.900
8	Kab. Aceh Utara	199.896
9	Kab. Bireuen	159.116
10	Kab. Aceh Pidie	233.016
11	Kab. Simeuleu	90.043
12	Kota Banda Aceh	145.114
13	Kota Sabang	80.258
14	Kota Langsa	85.498
15	Kota Lhokseumawe	95.473
16	Kab. Nagan Raya	94.900
17	Kab. Aceh Jaya	77.699
18	Kab. Aceh Barat Daya	80.452
19	Kab. Gayo Lues	85.734
20	Kab. Aceh Tamiang	92.011

Jumlah Se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam		2.555.510

II	Provinsi Sumatera Utara	302.047

1	Kab. Asahan	274.447
2	Kab. Dairi	131.494
3	Kab. Deli Serdang	485.416
4	Kab. Tanah Karo	179.845
5	Kab. Labuhan Batu	268.127
6	Kab. Langkat	273.583
7	Kab. Mandailing Natal	168.144
8	Kab. Nias	155.786
9	Kab. Simalungun	299.970
10	Kab. Tapanuli Selatan	252.889
11	Kab. Tapanuli Tengah	134.817
12	Kab. Tapanuli Utara	139.276
13	Kab. Toba Samosir	159.848
14	Kota Binjai	132.050
15	Kota Medan	404.990
16	Kota Pematang Siantar	140.229
17	Kota Sibolga	93.121
18	Kota Tanjung Balai	103.860
19	Kota Tebing Tinggi	110.041
20	Kota Padang Sidempuan	110.115
21	Kab. Pakpak Bharat	25.942
22	Kab. Nias Selatan	66.466
23	Kab. Humbang Hasundutan	71.368

Jumlah Se-Provinsi Sumatera Utara		4.483.871

III	Provinsi Sumatera Barat	234.249

1	Kab. Limapuluh Kota	167.840
2	Kab. Agam	190.470
3	Kab. Kepulauan Mentawai	99.249
4	Kab. Padang Pariaman	182.504
5	Kab. Pasaman	210.897

6	Kab. Pesisir Selatan	193.016
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	167.030
8	Kab. Solok	202.064
9	Kab. Tanah Datar	173.264
10	Kota Bukit Tinggi	103.859
11	Kota Padang Panjang	85.713
12	Kota Padang	272.154
13	Kota Payakumbuh	119.970
14	Kota Sawahlunto	81.802
15	Kota Solok	90.622
16	Kota Pariaman	70.578

Jumlah Se-Provinsi Sumatera Barat 2.645.281

IV Provinsi Riau 61.628

1	Kab. Bengkalis	206.723
2	Kab. Indragiri Hilir	203.823
3	Kab. Indragiri Hulu	162.264
4	Kab. Kampar	185.109
5	Kab. Kuantan Singingi	118.228
6	Kab. Pelalawan	109.947
7	Kab. Rokan Hilir	91.848
8	Kab. Rokan Hulu	104.146
9	Kab. Siak	95.609
10	Kota Dumai	93.479
11	Kota Pekanbaru	164.752

Jumlah Se-Provinsi Riau 1.597.556

V Provinsi Jambi 223.347

1	Kab. Batanghari	140.880
2	Kab. Bungo	147.824
3	Kab. Kerinci	177.753
4	Kab. Merangin	152.489
5	Kab. Muaro Jambi	128.074
6	Kab. Sarolangun	128.630
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	119.273
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	113.797
9	Kab. Tebo	128.758
10	Kota Jambi	186.780

Jumlah Se-Provinsi Jambi 1.647.605

VI Provinsi Sumatera Selatan 224.874

1	Kab. Lahat	193.320
2	Kab. Musi Banyuasin	145.336
3	Kab. Musi Rawas	187.256
4	Kab. Muara Enim	179.580
5	Kab. Ogan Komering Ilir	315.688
6	Kab. Ogan Komering Ulu	323.697
7	Kota Palembang	343.376

8	Kota Pagar Alam	85.810
9	Kota Lubuk Linggau	92.817
10	Kota Prabumulih	76.103
11	Kab. Banyuasin	165.377
Jumlah Se-Provinsi Sumatera Selatan		2.333.234
VII	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	168.285
1	Kab. Bangka	80.421
2	Kab. Belitung	78.190
3	Kota Pangkal Pinang	95.876
4	Kab. Bangka Selatan	41.210
5	Kab. Bangka Tengah	33.853
6	Kab. Bangka Barat	42.217
7	Kab. Belitung Timur	45.810
Jumlah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		585.862
VIII	Provinsi Bengkulu	222.618
1	Kab. Bengkulu Selatan	87.323
2	Kab. Bengkulu Utara	158.011
3	Kab. Rejang Lebong	198.967
4	Kota Bengkulu	156.083
5	Kab. Kaur	49.962
6	Kab. Seluma	73.672
7	Kab. Mukomuko	60.311
Jumlah Se-Provinsi Bengkulu		1.006.947
IX	Provinsi Lampung	275.506
1	Kab. Lampung Barat	149.384
2	Kab. Lampung Selatan	312.592
3	Kab. Lampung Tengah	308.268
4	Kab. Lampung Utara	215.610
5	Kab. Lampung Timur	257.028
6	Kab. Tanggamus	261.163
7	Kab. Tulang Bawang	203.812
8	Kab. Way Kanan	136.824
9	Kota Bandar Lampung	243.044
10	Kota Metro	116.050
Jumlah Se-Provinsi Lampung		2.479.281
X	Provinsi DKI Jakarta	743.531
Jumlah Se-Provinsi DKI Jakarta		743.531
XI	Provinsi Jawa Barat	467.764
1	Kab. Bandung	757.285
2	Kab. Bekasi	248.161
3	Kab. Bogor	556.963

4	Kab. Ciamis	409.150
5	Kab. Cianjur	411.220
6	Kab. Cirebon	407.416
7	Kab. Garut	490.611
8	Kab. Indramayu	333.712
9	Kab. Karawang	327.960
10	Kab. Kuningan	293.534
11	Kab. Majalengka	308.162
12	Kab. Purwakarta	196.907
13	Kab. Subang	313.196
14	Kab. Sukabumi	418.183
15	Kab. Sumedang	301.089
16	Kab. Tasikmalaya	387.801
17	Kota Bandung	434.502
18	Kota Bekasi	275.762
19	Kota Bogor	201.108
20	Kota Cirebon	139.431
21	Kota Depok	227.627
22	Kota Sukabumi	126.824
23	Kota Cimahi	145.802
24	Kota Tasikmalaya	192.839
25	Kota Banjar	42.501

Jumlah Se-Provinsi Jawa Barat 8.415.510

XII Provinsi Banten 187.863

1	Kab. Lebak	264.401
2	Kab. Pandeglang	284.431
3	Kab. Serang	346.946
4	Kab. Tangerang	401.159
5	Kota Cilegon	95.542
6	Kota Tangerang	201.020

Jumlah Se-Provinsi Banten 1.781.362

XIII Provinsi Jawa Tengah 553.064

1	Kab. Banjarnegara	260.996
2	Kab. Banyumas	374.867
3	Kab. Batang	211.879
4	Kab. Blora	285.250
5	Kab. Boyolali	300.183
6	Kab. Brebes	375.146
7	Kab. Cilacap	378.021
8	Kab. Demak	258.928
9	Kab. Grobogan	331.415
10	Kab. Jepara	258.973
11	Kab. Karanganyar	277.906
12	Kab. Kebumen	339.716
13	Kab. Kendal	286.808
14	Kab. Klaten	382.345
15	Kab. Kudus	217.441
16	Kab. Magelang	304.621

17	Kab. Pati	312.712
18	Kab. Pekalongan	233.319
19	Kab. Pemalang	312.264
20	Kab. Purbalingga	246.694
21	Kab. Purworejo	275.194
22	Kab. Rembang	196.642
23	Kab. Semarang	268.217
24	Kab. Sragen	283.621
25	Kab. Sukoharjo	263.304
26	Kab. Tegal	323.652
27	Kab. Temanggung	228.086
28	Kab. Wonogiri	326.104
29	Kab. Wonosobo	231.629
30	Kota Magelang	122.298
31	Kota Pekalongan	125.408
32	Kota Salatiga	107.734
33	Kota Semarang	310.736
34	Kota Surakarta	218.045
35	Kota Tegal	178.273

Jumlah Se-Provinsi Jawa Tengah 9.961.491

XIV Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 248.049

1	Kab. Bantul	292.700
2	Kab. Gunung Kidul	255.642
3	Kab. Kulon Progo	215.470
4	Kab. Sleman	307.331
5	Kota Yogyakarta	197.787

Jumlah Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1.516.979

XV Provinsi Jawa Timur 463.328

1	Kab. Bangkalan	246.209
2	Kab. Banyuwangi	372.023
3	Kab. Blitar	308.854
4	Kab. Bojonegoro	303.395
5	Kab. Bondowoso	251.718
6	Kab. Gresik	247.500
7	Kab. Jember	472.427
8	Kab. Jombang	292.095
9	Kab. Kediri	358.233
10	Kab. Lamongan	298.570
11	Kab. Lumajang	265.664
12	Kab. Madiun	230.124
13	Kab. Magetan	253.135
14	Kab. Malang	484.995
15	Kab. Mojokerto	257.944
16	Kab. Nganjuk	300.448
17	Kab. Ngawi	272.526
18	Kab. Pacitan	211.332
19	Kab. Pamekasan	230.952
20	Kab. Pasuruan	378.252

21	Kab. Ponorogo	278.567
22	Kab. Probolinggo	262.256
23	Kab. Sampang	214.531
24	Kab. Sidoarjo	343.075
25	Kab. Situbondo	206.730
26	Kab. Sumenep	363.407
27	Kab. Trenggalek	252.004
28	Kab. Tuban	278.098
29	Kab. Tulungagung	309.024
30	Kota Blitar	113.603
31	Kota Kediri	119.259
32	Kota Madiun	207.320
33	Kota Malang	211.628
34	Kota Mojokerto	109.540
35	Kota Pasuruan	125.070
36	Kota Probolinggo	111.589
37	Kota Surabaya	342.168
38	Kota Batu	99.344

Jumlah Se-Provinsi Jawa Timur 0.446.937

XVI Provinsi Kalimantan Barat 294.411

1	Kab. Bengkayang	124.563
2	Kab. Landak	160.018
3	Kab. Kapuas Hulu	202.240
4	Kab. Ketapang	254.434
5	Kab. Pontianak	245.525
6	Kab. Sambas	207.729
7	Kab. Sanggau	235.937
8	Kab. Sintang	256.174
9	Kota Pontianak	176.000
10	Kota Singkawang	118.734

Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Barat 2.275.765

XVII Provinsi Kalimantan Tengah 274.597

1	Kab. Barito Selatan	125.580
2	Kab. Barito Utara	121.148
3	Kab. Kapuas	200.263
4	Kab. Kotawaringin Barat	135.089
5	Kab. Kotawaringin Timur	180.176
6	Kota Palangkaraya	145.999
7	Kab. Barito Timur	93.427
8	Kab. Murung Raya	124.622
9	Kab. Pulang Pisau	110.316
10	Kab. Gunung Mas	106.885
11	Kab. Lamandau	78.121
12	Kab. Sukamara	68.389
13	Kab. Katingan	133.338
14	Kab. Seruyan	117.206

Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Tengah 2.015.156

XVIII	Provinsi Kalimantan Selatan	200.276
1	Kab. Banjar	174.963
2	Kab. Barito Kuala	135.246
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	139.608
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	139.260
5	Kab. Hulu Sungai Utara	79.174
6	Kab. Kota Baru	112.773
7	Kab. Tabalong	118.373
8	Kab. Tanah Laut	116.653
9	Kab. Tapin	116.531
10	Kota Banjar Baru	102.424
11	Kota Banjarmasin	194.081
12	Kab. Balangan	57.387
13	Kab. Tanah Bumbu	57.795
Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Selatan		1.744.544
XIX	Provinsi Kalimantan Timur	66.139
1	Kab. Berau	123.949
2	Kab. Bulungan	170.177
3	Kab. Kutai	297.814
4	Kab. Kutai Barat	116.624
5	Kab. Kutai Timur	103.060
6	Kab. Malinau	104.034
7	Kab. Nunukan	81.629
8	Kab. Pasir	116.584
9	Kota Balikpapan	135.092
10	Kota Bontang	75.718
11	Kota Samarinda	194.482
12	Kota Tarakan	72.991
13	Kab. Penajam Paser Utara	31.970
Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Timur		1.690.263
XX	Provinsi Sulawesi Utara	220.626
1	Kab. Bolaang Mongondow	219.319
2	Kab. Minahasa	210.510
3	Kab. Sangihe Talaud	141.699
4	Kota Bitung	119.755
5	Kota Manado	183.903
6	Kab. Kepulauan Talaud	87.918
7	Kab. Minahasa Selatan	125.425
8	Kota Tomohon	29.732
Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Utara		1.338.887
XXI	Provinsi Gorontalo	209.175
1	Kab. Bualemo	68.120
2	Kab. Gorontalo	170.681

3	Kota Gorontalo	134.877
4	Kab. Pohuwato	67.577
5	Kab. Bone Bolango	66.421

Jumlah Se-Provinsi Gorontalo 716.851

XXII Provinsi Sulawesi Tengah 258.145

1	Kab. Banggai	184.176
2	Kab. Banggai Kepulauan	131.080
3	Kab. Buol	112.587
4	Kab. Buol Toli Toli	136.256
5	Kab. Donggala	212.320
6	Kab. Morowali	149.257
7	Kab. Poso	206.871
8	Kota Palu	163.831
9	Kab. Parigi Moutong	139.159

Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Tengah 1.693.682

XXIII Provinsi Sulawesi Selatan 313.614

1	Kab. Bantaeng	109.648
2	Kab. Barru	125.409
3	Kab. Bone	262.319
4	Kab. Bulukumba	179.259
5	Kab. Enrekang	131.060
6	Kab. Gowa	211.368
7	Kab. Jeneponto	146.600
8	Kab. Luwu	152.792
9	Kab. Luwu Utara	107.732
10	Kab. Majene	116.114
11	Kab. Mamuju	133.210
12	Kab. Maros	151.906
13	Kab. Pangkajene Kepulauan	154.392
14	Kab. Pinrang	157.245
15	Kab. Polewali Mamasa	152.051
16	Kab. Selayar	108.368
17	Kab. Sidenreng Rappang	147.830
18	Kab. Sinjai	137.118
19	Kab. Soppeng	151.039
20	Kab. Takalar	138.354
21	Kab. Tana Toraja	201.814
22	Kab. Wajo	166.130
23	Kota Pare-pare	121.837
24	Kota Makassar	308.158
25	Kota Palopo	87.825
26	Kab. Mamasa	93.321
27	Kab. Luwu Timur	74.192
28	Kab. Mamuju Utara	34.868

Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Selatan 4.375.573

XXIV	Provinsi Sulawesi Tenggara	235.259
1	Kab. Buton	217.011
2	Kab. Kendari	174.747
3	Kab. Kolaka	186.083
4	Kab. Muna	191.451
5	Kota Kendari	145.150
6	Kota Bau-bau	110.997
7	Kab. Konawe Selatan	91.950

	Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Tenggara	1.352.648

XXV	Provinsi Bali	192.806

1	Kab. Badung	155.845
2	Kab. Bangli	126.374
3	Kab. Buleleng	248.515
4	Kab. Gianyar	193.933
5	Kab. Jembrana	144.661
6	Kab. Karangasem	170.302
7	Kab. Klungkung	124.218
8	Kab. Tabanan	209.132
9	Kota Denpasar	176.990

	Jumlah Se-Provinsi Bali	1.742.776

XXVI	Provinsi Nusa Tenggara Barat	231.537

1	Kab. Bima	176.678
2	Kab. Dompu	124.567
3	Kab. Lombok Barat	224.421
4	Kab. Lombok Tengah	243.035
5	Kab. Lombok Timur	291.019
6	Kab. Sumbawa	184.992
7	Kota Mataram	152.623
8	Kota Bima	88.624

	Jumlah Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.717.496

XXVII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	305.474

1	Kab. Alor	153.700
2	Kab. Belu	186.697
3	Kab. Ende	165.323
4	Kab. Flores Timur	150.222
5	Kab. Kupang	200.756
6	Kab. Lembata	121.234
7	Kab. Manggarai	173.147
8	Kab. Ngada	158.237
9	Kab. Sikka	153.290
10	Kab. Sumba Barat	182.594
11	Kab. Sumba Timur	162.358
12	Kab. Timor Tengah Selatan	204.905
13	Kab. Timor Tengah Utara	157.163
14	Kota Kupang	148.440

15	Kab. Rote Ndao	88.907
16	Kab. Manggarai Barat	65.846

Jumlah Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur		2.778.293

XXVIII	Provinsi Maluku	272.418

1	Kab. Maluku Tenggara Barat	170.484
2	Kab. Maluku Tengah	310.579
3	Kab. Maluku Tenggara	174.855
4	Kab. Pulau Buru	142.277
5	Kota Ambon	177.830

Jumlah Se-Provinsi Maluku		1.248.443

XXIX	Provinsi Maluku Utara	212.240

1	Kab. Halmahera Tengah	58.324
2	Kab. Halmahera Barat	93.864
3	Kota Ternate	126.042
4	Kab. Halmahera Timur	48.694
5	Kota Tidore Kepulauan	64.480
6	Kab. Kepulauan Sula	49.708
7	Kab. Halmahera Selatan	70.805
8	Kab. Halmahera Utara	59.790

Jumlah Se-Provinsi Maluku Utara		783.947

XXX	Provinsi Papua	369.930

1	Kab. Biak Numfor	191.243
2	Kab. Jayapura	169.791
3	Kab. Jayawijaya	147.997
4	Kab. Merauke	216.085
5	Kab. Mimika	155.156
6	Kab. Nabire	225.313
7	Kab. Paniai	209.656
8	Kab. Puncak Jaya	195.570
9	Kab. Yapen Waropen	110.838
10	Kota Jayapura	170.389
11	Kab. Sarmi	106.441
12	Kab. Keerom	57.135
13	Kab. Yahukimo	89.489
14	Kab. Pegunungan Bintang	67.350
15	Kab. Tolikara	57.442
16	Kab. Boven Digoel	87.798
17	Kab. Mappi	87.934
18	Kab. Asmat	108.705
19	Kab. Waropen	101.909

Jumlah Se-Provinsi Papua		2.926.171

XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	2.713

1	Kab. Kepulauan Riau	95.510
2	Kab. Natuna	147.584
3	Kab. Karimun	117.649
4	Kota Batam	104.201
5	Kota Tanjung Pinang	59.818
Jumlah Se-Provinsi Kepulauan Riau		527.475
XXXII	Provinsi Irian Jaya Barat	101.457
1	Kab. Sorong	120.285
2	Kab. Manokwari	167.411
3	Kab. Fak Fak	130.733
4	Kota Sorong	152.401
5	Kab. Sorong Selatan	97.671
6	Kab. Raja Ampat	37.231
7	Kab. Teluk Bintuni	77.863
8	Kab. Teluk Wondama	27.895
9	Kab. Kaimana	89.066
Jumlah Se-Provinsi Irian Jaya Barat		1.002.013
Total Provinsi		8.213.094
Total Kabupaten/Kota		73.917.846
Total Nasional		82.130.940

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI